

**ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG DENGAN MENGGUNAKAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY***

SKRIPSI

OLEH

OKKY CHANDRA

NIM : 16622101

PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG DENGAN MENGGUNAKAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY***

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

OKKY CHANDRA

NIM : 16622101

PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG DENGAN MENGGUNAKAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY***

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

OKKY CHANDRA

NIM : 16622101

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Andry Tonnaya, SE.,M.Ak
NIDN. 8823900016 / Asisten Ahli

Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, SE.,M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul :

**ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG DENGAN MENGGUNAKAN
KONSEP *VALUE FOR MONEY***

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

OKKY CHANDRA

NIM : 16622101

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Sembilan Belas
Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Andry Tonnaya,S.E.,M.Ak

NIDN. 8823900016 / Asisten Ahli

Hendy Satria,S.E.,M.Ak

NIDN. 1015069101 / Lektor

Anggota,

Nurfitri Zulaika,S.E.,M.Ak.Ak

NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 19 Januari 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Ketua

Charly Marlinda,S.E.,M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Okky Chandra
NIM : 16622101
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,67
Program Studi : Akuntansi / Strata – 1 (Satu)
Judul Skripsi : Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money*.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 19 Januari 2021
Penyusun

OKKY CHANDRA
NIM : 16622101

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini ku persembahkan untuk orangtuaku tercinta

Bapak Elfi Candra

Ibu Dewi Yuni Anggraini

Terimakasih untuk dukungan dan semangatnya

baik moril maupun materiil.

Terimakasih untuk kasih dan sayang yang selalu diberikan kepadaku, semoga apa

yang aku persembahkan ini bisa membuat kalian bangga kepadaku.

MOTTO

“Setiap waktu telah kita lewati dan hari akan terus berganti, kita tidak tau apa yang akan terjadi kedepannya, suka duka akan menjadi cerita”

(Okky Chandra)

“Jika kamu tidak bisa menjadi yang terbaik di dunia, setidaknya kamu harus bisa menjadi yang terbaik di titik kamu berdiri”

(Sendy Purnama Helliska)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan akuntansi pada program Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan dari berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.CA., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, MM,. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Andry Tonnaya, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan kritik serta saran membangun demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang memberikan ilmu dan dukungan
8. Keluarga tercinta yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberi kasih dan sayangnya serta doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Sendy Purnama Helliska atas segala dukungan, bantuan, semangat, dan saran serta masukan sehingga tugas ini dapat selesai pada waktunya.
10. Kepada Teman Satu Tongkrongan yang selalu menghibur dan memberi semangat dalam bentuk canda tawa setiap harinya.
11. Teman-teman Malam 1 Akuntansi Angkatan 2016 untuk kekompakkan, dukungan serta suka duka selama empat tahun di bangku perkuliahan yang tidak akan terlupakan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian yang akan datang. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tanjungpinang, 12 Desember 2020

Penulis

OKKY CHANDRA

NIM : 16622101

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Penelitian	5
1.4 Tujuan Masalah	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	6
1.5.2 Kegunaan praktis	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	8
2.1.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia	9
2.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	12
2.2 Pengukuran Kinerja Sektor Publik	15
2.2.1 Pengertian Kinerja	15
2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja	16

2.2.3 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja.....	17
2.2.4 Informasi Yang Digunakan Untuk Megukur Kinerja.....	18
2.2.5 Indikator Kinerja	23
2.2.6 Komponen dalam penentuan indikator kinerja.....	23
2.2.7 Sistem Pengukuran Kinerja	24
2.3 Value For Money	25
2.3.1 Pengertian Value For Money.....	26
2.3.2 Konsep Value For Money	27
2.3.2.1 Ekonomis	27
2.3.2.2 Efisiensi	28
2.3.2.3 Efektivitas	28
2.3.3 Indikator Value for Money.....	29
2.2 Kerangka Pemikiran	32
2.3 Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Jenis Data.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4 Definisi Operasional Variabel	39
3.5 Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Konsep	39
Tabel 3.2 Kriteria Ekonomis	40
Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi	41
Tabel 3.4 Kriteria Efektivitas	42
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018	46
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018	50
Tabel 4.3 Rencana Penarikan Dana yang Bersumber dari DAK tahun 2018 Guna untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Tujuh Puskesmas di Kota Tanjungpinang	55
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Rumus Rasio Ekonomis	27
Gambar 2.2 Rumus Rasio Efisiensi.....	28
Gambar 2.3 Rumus Rasio Efektivitas	29
Gambar 2.4 Konsep <i>Value For Money</i>	29
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian	32
Gambar 3.1 Rumus Rasio Ekonomis	40
Gambar 3.2 Rumus Rasio Efisiensi.....	41
Gambar 3.3 Rumus Rasio Efektivitas	41

ABSTRAK

ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

Okky Chandra, 16622101. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi ekonomis, sisi efisiensi, sisi efektivitas berdasarkan konsep *Value For Money*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018.

Hasil penelitian yang didapat yaitu kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 berdasarkan konsep *Value For Money*, ditinjau dari sisi ekonomis sudah tergolong ekonomis dengan rata-rata rasio ekonomis sebesar 89%, ditinjau dari sisi efisiensi tergolong belum efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 91,9%, dan ditinjau dari sisi efektivitas tergolong belum efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 81,57%.

Upaya yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan kinerja keuangannya adalah dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana bidang kesehatan secara periodik, menyusun laporan analisis atas skala prioritas kebutuhan untuk pemenuhan sarana dan prasarana bidang kesehatan, dan menyelaraskan jadwal kegiatan antar penanggungjawab saat melakukan perencanaan terkait penyusunan jadwal kegiatan serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia pada puskesmas untuk menjalankan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan.

Kata Kunci : *Value For Money, Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Bidang Kesehatan*

Skripsi, STIE Pembangunan Tanjungpinang, Desember 2020
(XV + 61 Halaman + 8 Tabel + 8 Gambar)

Referensi : 12 Buku (2010-2020) + 5 Jurnal

Dosen Pembimbing I : Andry Tonnaya, SE.M.Ak

Dosen Pembimbing II : Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA

ABSTRACT

ANALYSIS FINANCIAL PERFORMANCE OF TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT USING CONCEPT OF VALUE FOR MONEY

Okky Chandra, 16622101. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang

The purpose of this study is to analyze and find out the financial performance of the Tanjungpinang City Government on the management of funds in the health sector in supporting basic health in 2018 from an economic, efficiency, effectiveness side based on the concept of Value For Money.

The method used in this research is a qualitative descriptive method using secondary data in the form of a performance examination report on the management of funds in the health sector in supporting basic health in 2018.

The results of the research obtained are the financial performance of the Tanjungpinang City Government on the management of funds in the health sector in supporting basic health in 2018 based on the concept of Value For Money, in terms of economics it is classified as economical with an average economic ratio of 89%, in terms of efficiency. classified as inefficient with an average efficiency ratio of 91,9%, and in terms of effectiveness it is classified as ineffective with an average effectiveness ratio of 81.57%.

Efforts that should be made by the Tanjungpinang City Government in improving its financial performance are by monitoring and evaluating the use of health sector funds periodically, compiling analysis reports on the priority scale of needs for the fulfillment of health sector facilities and infrastructure, and synchronizing the schedule of activities between people in charge when planning. related to the preparation of a schedule of activities and considering the availability of human resources at the puskesmas to carry out Health Operational Assistance activities.

Keywords: Value For Money, Financial Statements, Financial Performance, Health Sector

*Thesis, STIE Pembangunan Tanjungpinang, December 2020
(XV + 61 Pages + 8 Tables + 8 Pictures)*

Reference: 12 Books (2010-2020) + 5 Journals

Supervisor I: Andry Tonnaya, SE.M.Ak

Supervisor II: Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warganegara untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur negara merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya tatakelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Berhasilnya penyelenggaraan negara sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan serta disiplin para penyelenggara negara. Aparatur negara di pusat dan daerah sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dituntut harus berperan dalam mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Salah satu cara masyarakat untuk mengetahui apakah pemerintah telah melaksanakan tatakelola yang baik yaitu melalui kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kinerja keuangan merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik.

Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Pemerintah merupakan organisasi yang dalam melakukan tugasnya tidak untuk menghasilkan keuntungan (*pure non profit organization*), hal ini berbanding terbalik dengan organisasi sektor bisnis yang tujuan utamanya untuk menghasilkan keuntungan.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dibidang ekonomi dan sosial budaya secara bersama, karena itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup : Kondisi ekonomi nasional yang meliputi (a) Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (b) Produk domestik bruto riil per kapita (c) Tingkat tabungan (d) Defisit atau surplus keuangan daerah (e) Utang dalam dan luar negeri (f) Cadangan emas dan devisa; Lingkungan bisnis yang meliputi indeks kebebasan ekonomi, perlindungan hak milik, indeks persepsi korupsi dan kebebasan bank.

Stabilitas dan pengembangan yang meliputi sebaran pendapatan, paritas upah tenaga kerja pria/wanita, tingkat pengangguran, partisipasi politik, jumlah pengungsi, kepastian hukum, jumlah kendaraan pribadi dan umum dan kondisi keamanan daerah; Kesehatan yang meliputi tingkat kelahiran maupun kematian, harapan hidup, tingkat kematian, program pemeliharaan kesehatan; Dan pendidikan di daerah yang meliputi tingkat partisipasi pendidikan, anggaran pendidikan, kualitas tenaga pengajar. Indikator kinerja pemerintah meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit, dan indikator impact.

Dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah telah menjadi petelak dasar pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Implikasi kedua undang-undang tersebut bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya dibidang sistem keuangan, adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*Budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan daerah (*audit reform*). Serta sistem manajemen keuangan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah dikelolanya uang rakyat secara transparan dengan mendasarkan konsep *Value For Money* (VFM) agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan instansi yang selalu merugi. Pemerintah Kota Tanjungpinang yang merupakan objek penelitian dalam penelitian ini juga mengimplikasikan kedua undang-undang tersebut diatas, yaitu dengan menerapkan Perda Kota Tanjungpinang No. 04 tahun 2008 dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya, dimana tercantum pada Perda Kota Tanjungpinang No. 04 Pasal 4 mengenai azas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Hal ini merupakan upaya pemerintah kota tanjungpinang untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang menginginkan agar organisasi sektor publik dapat mencapai *good governance* dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, yaitu tata kelola pemerintah daerah yang transparan, partisipatif, ekonomis, efisiens, efektif, responsif dan akuntabel. Dalam konteks otonomi daerah, *Value For Money* (VFM) merupakan

jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. *Value For Money* (VFM) tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity and service coverage).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini bahwa dibutuhkannya analisa kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang ekonomis, efisien, dan efektif sehingga mencerminkan akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi Ekonomis berdasarkan konsep *Value For Money* ?

2. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi Efisiensi berdasarkan konsep *Value For Money* ?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi Efektivitas berdasarkan konsep *Value For Money* ?

1.3 Batasan Penelitian

Untuk mempermudah penentuan dan proses dalam pengumpulan data dalam menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang maka pembahasan masalah oleh peneliti hanya mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi Ekonomis berdasarkan konsep *Value For Money*.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi Efisiensi berdasarkan konsep *Value For Money*.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi Efektivitas berdasarkan konsep *Value For Money*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi teoritis dan empiris dan peningkatan ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah yang merupakan salah satu faktor yang mencerminkan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara / Daerah.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah menyadari bahwa tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah. Sehingga harus memiliki kinerja keuangan yang baik dalam mengelola keuangan Negara / Daerah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik pada khususnya dalam hal menganalisa kinerja keuangan pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penulisan hasil penelitian secara menyeluruh dan agar mudah dimengerti, maka akan disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang judul usulan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua ini digunakan penulis menyajikan dan menjelaskan tentang kajian teori yang relevan yang topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ketiga ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, sumber jenis data yang digunakan pada penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian dan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini serta lokasi dan waktu ataupun jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke empat ini akan dibahas gambaran umum dari objek penelitian dan akan dilakukannya analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan diberikannya saran sehubungan dengan pencapaian atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta (Bastian, 2010). Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penerapan mekanisme akuntansi pada organisasi pemerintahan bukan berarti bahwa akuntansi organisasi komersial sepenuhnya diterapkan pada organisasi pemerintahan. Karena perbedaan sifat, tujuan, lingkungan, dan standar akuntansi. Maka penerapan akuntansi pada organisasi pemerintahan berbeda dibandingkan dengan penerapan akuntansi pada organisasi perusahaan (Siregar, 2015). Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas publik sebagai penyedia informasi keuangan, pengontrolan manajemen dan pertanggungjawaban yang dapat dijadikan sebagai alat informasi bagi pemerintah dan publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi

pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut (Mardiasmo, 2018).

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah sistem yang dilaksanakan oleh suatu entitas publik dengan melakukan pelaporan, perhitungan, pengklasifikasian, informasi dan ringkasan yang bersifat kuantitatif atau material mengenai keuangannya terhadap seluruh kegiatan atau transaksi pada suatu periode tertentu (Sukirno, 2015).

Akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Akuntansi pemerintahan dalam akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah aktivitas keuangan yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik.

2.1.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Di Indonesia, akuntansi sektor publik awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 belum banyak berkembang. Menurut catatan sejarah, penerapan akuntansi sektor publik awalnya adalah pembuatan Neraca yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk laporan keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda. Pada era

pemerintahan orde lama sekitar tahun 1950an, sektor publik berperan besar dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi pembangunan Indonesia. Dengan adanya akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan manajemen ekonomi makro membantu pencatatan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan negara. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah BUMN.

Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai membuat kebijakan yaitu nasionalisasi perusahaan asing yang di transformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), contoh adalah perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya sumbangan sektor publik dapat digunakan sebagai alat pantau pembangunan nasional dan stabilitas publik, sejak saat itulah akuntansi sektor publik di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan yang semakin pesat yang ditandai dengan adanya 3 paket undang-undang di bidang keuangan negara :

1. UU No. 17 th 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara, penyusunan/penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia (Bank Sentral), Pemerintah Daerah luar negeri (negara/lembaga), Perusahaan privat, dan organisasi nir laba. Reformasi keuangan negara tersebut mendorong lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan melalui (SAP) PP No 24 tahun 2005.
2. UU No. 1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dan terdiri atas : (1) PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan; (2) PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran; (3) PSAP 03 : Laporan Arus

Kas; (4) PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan; (5) PSAP 05 : Akuntansi Persediaan; (6) PSAP 06 : Akuntansi Investasi; (7) PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap; (8) PSAP 08 : Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan; (9) PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban; (10) PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa; (11) PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian, dan; (12) PSAP 12 Laporan Keuangan Operasional. (13) PSAP Laporan Keuangan BLU; (14) Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Standar Akuntansi Pemerintahan diperlakukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Salda Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selengkapnya : (1) SAP-Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; (2) PSAP 1,2,3,4,12 Laporan Keuangan; (3) Keterkaitan Diantara Laporan Keuangan; (4) PSAP 05 Akuntansi Persediaan; (5) PSAP 06 Akuntansi Investasi; (6) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap; (7) PSAP 08 Kontruksi Dalam Pengerjaan; (8) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban. Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam UU Bidang Keuangan Negara, yaitu :

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi) berdasarkan hasil atau kinerja.
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.
3. Pemberdayaan manajer professional.
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini adalah adanya pelaksanaan otonomi daerah (hak tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri) dan desentralisasi (pendelegasian wewenang). Saat ini desentralisasi tidak hanya berarti pelimpihan wewenang dari pemerintah kepada pihak swasta dengan privatisasi (perlibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik).

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015) Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulance*. Komponen lingkungan mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat inflasi
3. Pertumbuhan pendapatan per kaptital (GNP/GDP)
4. Struktur produksi
5. Tenaga kerja
6. Arus modal dalam negeri
7. Cadangan devisa
8. Nilai tukar mata uang
9. Utang dan bantuan luar negeri
10. Infrastruktur
11. Teknologi

12. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

13. Sektor informal

b. Faktor politik

Faktor politik yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

1. Hubungan negara dan masyarakat

2. Legitimasi pemerintah

3. Tipe rezim yang berkuasa

4. Idiologi negara

5. Elit politik dan massa

6. Jaringan internasional

7. Kelembagaan

c. Faktor kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

1. Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya

2. Sistem nilai di masyarakat

3. Historis

4. Sosiologi masyarakat

5. Karakteristik masyarakat

6. Tingkat pendidikan

d. Faktor demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk

2. Struktur usia penduduk

3. Migrasi

4. Tingkat kesehatan

Pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi dalam hal penentuan kebijakan fiskal dan moneter, melakukan regulasi terhadap sektor swasta, pemberian barang dan pelayanan publik, serta melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan merata. Terdapat beberapa alasan yang mendasar mengapa pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi, yaitu:

a. Adanya kegagalan pasar (*market failure*)

Kegagalan pasar dapat disebabkan karena tidak berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, pasar yang tidak kompetitif, dan adanya monopoli serta monopsoni. Intervensi pemerintah dilakukan untuk mendorong terciptanya pasar yang sehat dan mencegah terjadinya monopoli dan monopsoni yang mengganggu pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya informasi yang tidak sempurna (*assymetric information*) serta ketidakpastian yang memungkinkan diperolehnya *abnormal return* bagi pihak yang memiliki informasi yang lebih baik.

Kegagalan pasar juga dapat terjadi karena adanya eksternalitas yaitu keadaan ketika keuntungan pada sektor publik (*public benefits*) melebihi keuntungan yang diperoleh sektor swasta (*private benefits*), atau ketika kerugian yang ditanggung publik lebih besar dari biaya perusahaan (misalnya, polusi dan masalah lingkungan lainnya). Adanya kegagalan pasar di sektor swasta tidak berarti pemerintah harus menyediakan semua barang / jasa yang menjadi kebutuhan publik. Masalah kegagalan pasar dapat diatasi dengan melakukan regulasi sektor swasta, pembuatan kebijakan harga, pajak, dan subsidi. Akan tetapi harus diingat pula bahwa sektor publik dapat juga mengalami kegagalan, yaitu apa yang sering diistilahkan dengan “*goverment failure*”. Kegagalan sektor publik dapat terjadi karena tidak adanya kepastian hukum, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.

b. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata

Pemerintah berkepentingan untuk melakukan intervensi apabila pendapatan, kekayaan, keterampilan, dan kemampuan terdistribusi secara tidak merata. Proses mekanisme pasar apabila dibiarkan berjalan bebas mempunyai kecenderungan memperkuat ketidakmerataan tersebut, karena prinsip *survival of the fittest* menyebabkan kelompok marginal semakin terpinggirkan dan kehilangan posisi. Pemerintah berkepentingan untuk menciptakan distribusi yang adil dan merata.

c. Untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan

Sistem pasar selalu berusaha mencari titik ekuilibrium, akan tetapi pasar cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah melakukan campur tangan menstabilkan pasar, meskipun terkadang campur tangan pemerintah menimbulkan efek negatif terhadap pasar.

2.2 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2018), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja merupakan suatu keberhasilan individu dalam mengerjakan tugasnya yang bisa dilihat dari segi dimensi keterikatan, keahlian merencanakan, daya usaha dalam

pekerjaan dan prestasi secara keseluruhan (Ratnasari, 2019). Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Sulaksono, 2019). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu pencapaian individu maupun kelompok atas tugas-tugas yang dimilikinya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang menandakan apakah berhasil atau tidaknya pencapaian tersebut.

2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2018), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain :

1. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengembalian keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.

5. Mengalokasikan sumber daya.
6. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
7. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas Publik.

Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka perusahaan akan mendapat manfaat langsung yaitu seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.2.3 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Untuk mengukur kinerja yang perlu dilihat adalah elemen tujuan, sasaran dan strategi organisasi sektor publik.

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja perlu indikator-indikator (penilaian kinerja secara tidak langsung, hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi kinerja) apa saja yang akan digunakan.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mengukur kinerja dengan cara mengukur seberapa besar pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). Untuk mengukur kinerja dengan cara mengevaluasi kinerja dengan cara :
 - a) *Feedback* : yaitu seberapa pencapaian kinerja dijadikan dasar pengelola organisasi untuk perbaikan berikutnya.
 - b) Penilaian kemajuan organisasi : penilaian kinerja dilakukan setiap periode dengan penilaian berupa kriteria-kriteria. Jika pencapaiannya lebih rendah dari tujuan yang telah ditetapkan maka perlu ditemukan sumber penyebabnya.
 - c) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas : pengukuran kinerja akan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan membantu menilai keberhasilan manajemen.

2.2.4 Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja

1. Informasi Finansial

Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual / realisasi dengan yang dianggarkan. Analisis Varian secara garis besar:

- a. Varians Pendapatan (*revenue variance*)
- b. Varians Pengeluaran / Belanja (*expenditure variance*)

- c. Varians Belanja Rutin (*recurrent expenditure variance*)
- d. Varians Belanja Investasi (*capital expenditure variance*)

Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut (apa, siapa / bagian mana, kenapa, dan bagaimana). Keterbatasan analisis varians diantaranya adalah kesulitan menetapkan batasan besarnya varians.

2. Informasi Non Finansial.

Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *Balanced Scorecard*.

Metode *Balanced Scorecard* merupakan aspek finansial dan juga aspek nonfinansial. *Balanced Scorecard* dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena *Balanced Scorecard* tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan nonfinansial. Hal tersebut sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja utama, namun pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan nonkeuangan (Mahmudi, 2011). Pengukuran dengan metode ini melibatkan empat aspek, antara lain :

A. Perspektif finansial (*financial perspective*)

Perspektif finansial menjadi perhatian dalam *balance scorecard* karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Aspek keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategi memberikan perbaikan yang mendasar. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu :

- 1) *Growth* (bertumbuh) : tahapan awal siklus kehidupan perusahaan dimana perusahaan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Disini manajemen terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk/jasa dan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, ,mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung hubungan global, serta membina dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan.
- 2) *Sustain* (bertahan) : tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Pada tahap ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan mengembangkannya jika memungkinkan.
- 3) *Harvest* (menuai) : tahapan ketiga dimana perusahaan benar-benar menuai hasil investasi di tahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan.

B. Perspektif kepuasan pelanggan (*customer perspective*)

Dalam perspektif ini perhatian perusahaan harus ditujukan pada kemampuan internal untuk peningkatan kinerja produk, inovasi dan teknologi dengan memahami selera pasar. Dalam perspektif ini peran riset pasar sangat besar. Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu :

- 1) *Core measurement group*, yang memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu :
 - a) Pangsa Pasar (*market share*) : pangsa pasar ini menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar tertentu. Hal itu diungkapkan dalam bentuk jumlah pelanggaran uang yang dibelanjakan atau volume satuan yang terjual.

- b) Retensi Pelanggan (*Customer Retention*) : menunjukkan tingkat dimana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya presentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang ada saat ini.
 - c) Akuisisi Pelanggan (*Customer Acquisition*) : pengukuran ini menunjukkan tingkat dimana suatu bisnis mampu menarik pelanggan baru dalam memenangkan bisnis baru. Akuisisi ini dapat diukur dengan membandingkan banyaknya jumlah pelanggan baru di segmen yang ada.
 - d) Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*) : pengukuran ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria spesifik dalam *value proportion*.
- 2) *Customer Value Proportion* yang merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada *Core value proportion* didasarkan pada atribut sebagai berikut :
- a) *Product/service attributes* yang meliputi fungsi produk atau jasa, harga dan kualitas. Perusahaan harus mengidentifikasi apa yang diinginkan pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan.
 - b) *Customer relationship* adalah strategi dimana perusahaan mengadakan pendekatan agar perasaan pelanggan merasa puas atas produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan.
 - c) *Image and reputation* membangun *image* dan reputasi dapat dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang dijanjikan.
- C. Perspektif efisiensi proses internal (*internal process efficiency*). Dalam hal ini perusahaan berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu:

a) Proses inovasi

Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan.

Proses inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan.
- 2) Pengukuran terhadap proses pengembang produk.

b) Proses Operasi

Pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis, lebih menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketetapan waktu dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan.

c) Pelayanan Purna Jual

Tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah dilakukannya pengukuran terhadap pelayanan purna jual kepada pelanggan. Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup penting dalam proses bisnis internal, karena pelayanan purna jual ini akan akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan.

D. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif *Balanced Scorecard*.

2.2.5 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*). Faktor Keberhasilan Utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Indikator Kinerja Kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.

2.2.6 Komponen Indikator kinerja

1. Biaya pelayanan (*cost of service*)

Indikator biaya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena *output* yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut maka dibuat indikator kinerja produksi misalnya belanja per kapita.

2. Penggunaan (*utilization*)

Indikator ini membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus

mempertimbangkan preferensi publik sedangkan pengukurannya berupa volume absolut atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas. Contoh lain yaitu rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur.

3. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)

Indikator ini merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Contohnya yaitu perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu.

4. Cakupan pelayanan (*coverage*)

Indikator ini perlu dipertimbangkan jika terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

5. Kepuasan (*satisfaction*)

Indikator kepuasan diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjarangan aspirasi masyarakat (*need assessment*) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja.

2.2.7 Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur

dinansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja komprehensif dirancang untuk bisa memberikan manfaat jangka panjang (*sustainable*).

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang ditunjukkan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu.

Perencanaan strategis berkaitan dengan perencanaan jangka panjang organisasi. Pada umumnya perencanaan strategis menghasilkan dan merumuskan visi, misi, falsafah yang diterjemahkan lebih lanjut dalam kebijakan, tujuan, sasaran, dan strategi. Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi.

Misi merupakan pernyataan terhadap bidang atau kegiatan terbaik yang mampu dilakukan organisasi. Falsafah merupakan nilai-nilai etis yang ditanamkan di organisasi untuk membentuk perilaku pegawai dan organisasi dan membentuk budaya organisasi. Kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Kebijakan ini ditetapkan dengan mendasarkan pada falsafah yang sudah ditetapkan.

2. Penyusunan Program

Penyusunan program (*programming*) adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut. Penyusunan program meliputi tiga kegiatan, yaitu :

- a. Analisis usulan program baru
- b. Penelaahan program yang sedang berjalan
- c. Penyusunan sistem koordinasi program secara terpisah

2.3 Value For Money

2.3.1 Pengertian Value For Money

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktifitasnya.

Menurut Mardiasmo (2018) *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. *Value For Money* merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. *Value For Money* yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

Value For Money (VFM) adalah istilah digunakan untuk menilai apakah sebuah suatu organisasi termasuk tentunya lembaga sektor publik telah memperoleh manfaat yang maksimum (the maximum benefit) atau belum dari barang-barang dan jasa yang tersedia atau dimiliki. *Value For Money* (VFM) tidak hanya mengukur biaya-biaya yang berkaitan dengan barang-barang dan jasa tersebut tetapi juga memperhatikan kombinasi mutu, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian dengan tujuan organisasi, ketepatan waktu dan kenyamanan untuk menilainya. (Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017)

2.3.2 Konsep *Value For Money*

2.3.2.1 Ekonomis

Ekonomi, merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (*Mardiasmo, 2018*).

Menurut Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2017) Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Ekonomis diartikan bahwa pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Bastian, 2010).

Gambar 2.1

Rumus Rasio Ekonomis

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Sumber: (Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

2.3.2.2 Efisiensi

Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo,2018).

Menurut Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2017) Efisiensi diartikan menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang sama dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih sedikit. Atau dengan kata lain menggunakan input yang lebih sedikit untuk sebuah pekerjaan atau kegiatan dalam memberikan pelayanan. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2010).

Gambar 2.2
Rumus Rasio Efisiensi

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Sumber: (Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

2.3.2.3 Efektivitas

Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *Valur For Money*, sedangkan tambahannya, dua elemen lain yaitu keadilan (Mardiasmo,2018). Menurut Kemenkeu

RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2017) Efektifitas atau keefektivan diartikan menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada publik yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang sama atau lebih sedikit.

Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (target/result). Dengan kata lain, efektivitas atau keefektifan merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Bastian, 2010).

Gambar 2.3

Rumus Rasio Efektivitas

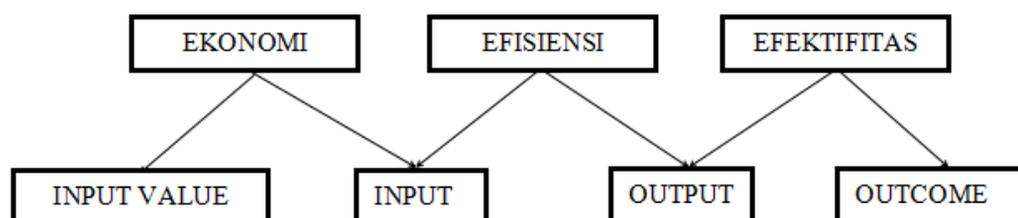
$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Sumber: (Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

2.3.3 Indikator Value For Money

Gambar 2.4

Konsep Value For Money



Sumber: (Mardiasmo, 2018)

1. Masukan (*Input*)

Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktifitas. Sebagai contoh : dokter di RS, tanah di jalan, guru di sekolah, dan sebagainya. Dapat dinyatakan secara kuantitatif (jumlah guru, luas tanah, jumlah guru dan sebagainya), dinyatakan dengan nilai rupiah (biaya dokter, harga tanah, gaji guru dan sebagainya). Penentuan metode harganya : harga pasar, harga beli dan sebagainya.

2. Keluaran (*Output*)

Keluaran merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Harus diingat pula keluaran yang diinginkan, dan keluaran lainnya yang tidak diinginkan yang merupakan efek samping. Mengukur keluaran (kualitatif) lebih sulit dilakukan pada pelayanan sosial, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Pengukuran kualitatif dapat dilakukan berupa kenaikan nilai, atau nilai tambah seperti peningkatan kualitas hidup.

3. Sasaran Antara (*Throughput*)

Analisis *Value For Money* memerlukan data input dan output yang memadai karena *Value For Money* mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. Permasalahan yang sering muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap terutama data output. Tidak tersedianya data output yang lengkap tidak berarti analisis *Value For Money* tidak dapat dilakukan. Karena untuk mengukur output seringkali terdapat kesulitan, organisasi sektor public menggunakan output antara (*intermediate output*) atau indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai alat ukur output. Banyak ukuran yang dianggap menunjukkan output pada kenyataannya adalah *throughput*, sebagai contoh volume aktivitas.

Jumlah operasi yang dilakukan di rumah sakit merupakan *throughput* bukan output. Output yang lebih tinggi yang hendak dicapai rumah sakit adalah memperbaiki kesehatan masyarakat, meningkatkan angka harapan hidup, dan sebagainya.

4. Pencapaian Hasil (*Outcome*)

Hasil adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Misalnya hasil pengumpulan sampah oleh Dinas Kebersihan untuk lingkungan kota yang bersih dan sehat. Biasanya dikaitkan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai.

Ada beberapa hal yang menyebabkan *outcome* sulit ditetapkan atau diukur:

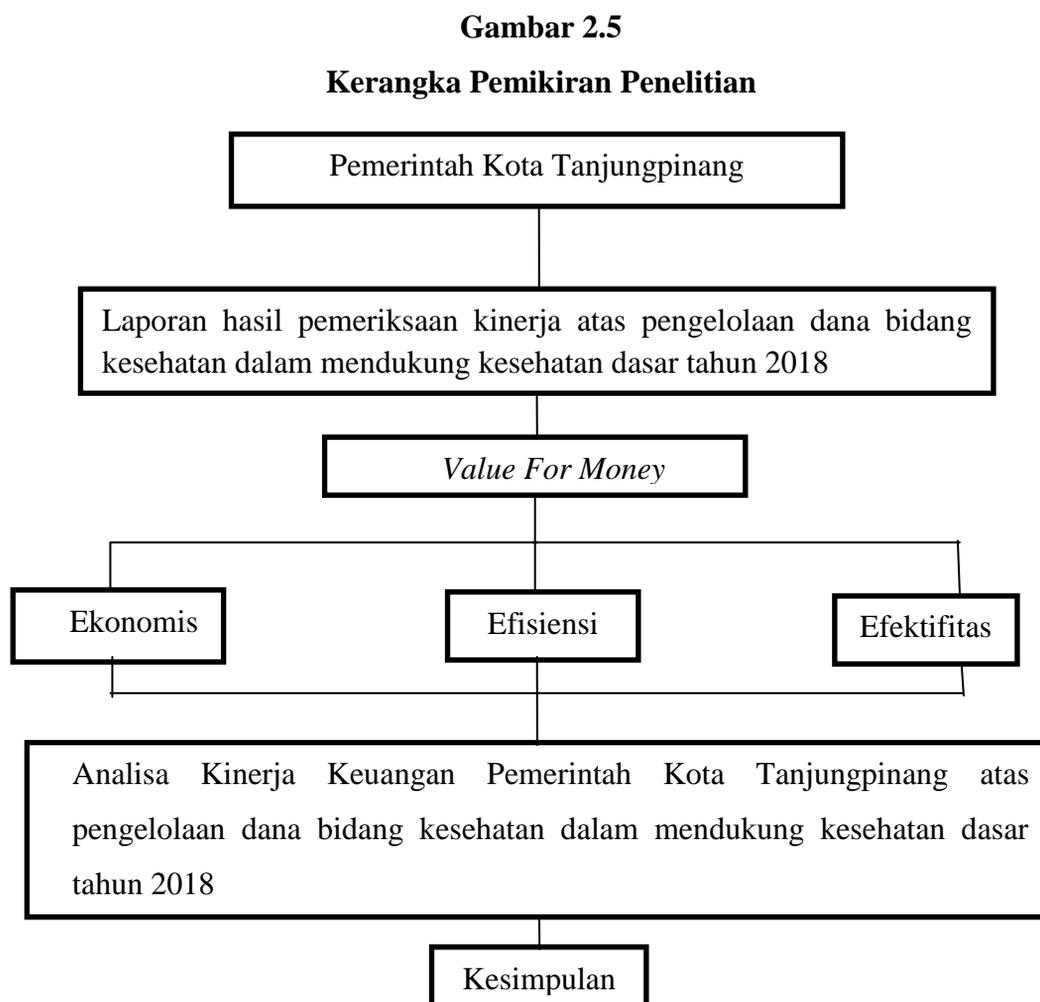
1. Tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan *outcome* sulit ditetapkan atau diukur
2. Adanya masalah politik dalam proses penetapan *outcome* yang memudahkan monitoring
3. Penentuan *outcome* perlu pertimbangan kualitas, *output* meningkat, lebih ekonomis dan efisien.

Value For Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya masukan paling kecil untuk mencapai keluaran yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Konsep *Value For Money* sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan *good governance*. Manfaat konsep *Value For Money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan input.
4. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian ini:



Sumber: Konsep Yang Disesuaikan Untuk Penelitian, 2019

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan referensi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. (Liando, Paul, Saerang, & Elim, 2014)

Penelitian yang dilakukan (Liando et al., 2014) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value For Money*”, bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2012 sampai 2013 dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Value For Money* untuk mengukur kinerja keuangan dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012 dan 2013.

Hasil analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe dari segi ekonomis disimpulkan bahwa pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimisasi anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisiensi harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, dan dari segi efektivitas dapat diperbaiki dengan upaya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan anggaran, serta aparatur pengelola anggaran agar dapat lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat.

2. (Lexy Tambuwun, S Pangemanan, & Afandi, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh (Lexy Tambuwun et al., 2014) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado”, bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di kantor Walikota Manado, data yang digunakan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran

Tahun 2011-2013. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

Hasil penelitian Rasio Derajat Desentralisasi Kinerja Keuangannya dinilai masih kurang, Rasio Ketergantungan keuangan daerah menunjukkan ketergantungan pemerintah kota Manado terhadap pendapatan dari pusat dan provinsi masih tinggi, tingkat kemandirian pemerintah Kota Manado juga masih kurang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, kemudian efektivitas realisasi penerimaan PAD pemerintah Kota Manado dikatakan cukup efektif, begitu pula halnya dengan efisiensi belanja pemerintah Kota Manado yang dapat dikategorikan baik yang diukur dengan Rasio efisiensi belanja. Mengingat terbatasnya jumlah, jenis sumber-sumber pendapatan asli daerah, diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola, dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.

3. (Purnomo, Putra, Gusti, & Wirawati, 2015)

Penelitian yang dilakukan (Purnomo et al., 2015) yang berjudul “Penilaian Kinerja berbasis *Value For Money* atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dinas pendapatan daerah Kabupaten Tabanan atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2013 berdasarkan variabel ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis Kuantitatif dan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja dinas pendapatan Kabupaten Tabanan jika dilihat dari kriteria ekonomi tahun anggaran 2010-2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan dikategorikan sangat ekonomis karena tingkat rasio ekonomisnya berada di atas 100%. Ditinjau dari sudut efisiensi untuk pendapatan asli daerah tahun anggaran 2010-2013 dikategorikan sangat efisien karena rasio

efisiensinya kurang dari 60%. Ditinjau dari sudut efektivitasnya kinerja dinas pendapatan daerah Kabupaten Tabanan untuk pendapatan asli daerah tahun 2010-2013 mengalami fluktuasi namun masih dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitasnya diatas 100%.

4. (Roshayani & Norzaihan, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (Roshayani & Norzaihan, 2017) dengan judul "*Performance Measurement and Accountability Of Waqf Institutions In Malaysia*" menunjukkan bahwa telah terlihat selama beberapa tahun terakhir bahwa pembangunan lembaga wakaf telah meningkatkan minat komunitas Muslim di seluruh dunia. Sejalan dengan revitalisasi, masalah mengukur dan mengelola kinerja wakaf semakin banyak dibahas dan diperhatikan oleh akademisi dan konstituen. Lembaga wakaf perlu menunjukkan kinerja mereka sebagaimana mereka telah mengelola secara efektif dan efisien untuk melaksanakan akuntabilitas mereka ke berbagai pihak pengendali kepentingan wakaf. Ada banyak penelitian yang dilakukan untuk mengukur kinerja berbagai organisasi di sektor swasta dan publik. Namun, studi tentang kinerja pengukuran lembaga wakaf masih terbatas, dan rasio keuangan menjadi dominan pengukuran dalam studi tersebut. Kinerja pengukuran lembaga wakaf juga harus fokus pada mewujudkan misi mereka. Karena itu tujuannya makalah ini adalah untuk membahas pengukuran keuangan dan non-keuangan yang dapat diadaptasi oleh lembaga wakaf untuk menilai kinerja mereka dalam melaksanakan akuntabilitas mereka. Mendeskripsikan dari pengalaman tentang pengukuran kinerja yang dibahas dalam literatur organisasi nirlaba, dalam hal ini makalah konseptual diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana kinerja lembaga wakaf mungkin dapat diukur dan menyediakan alat untuk

membandingkan praktik terbaik yang dapat membimbing mereka untuk mencapai tujuan dan misi mereka.

5. (Kloot, 2005)

Penelitian yang dilakukan oleh (Kloot, 2005) yang berjudul “*Performance Measurement and Accountability In An Australian Fire Service*”. Bertujuan untuk menanyakan langkah-langkah kinerja apa yang penting dalam konteks penyediaan layanan kebakaran. Teknik metodologi/pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis konten, penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi laporan tahunan layanan kebakaran yang tersedia untuk umum untuk menentukan kinerja operasional dan keuangan di negara bagian Victoria, yang memiliki tiga organisasi layanan kebakaran yang berbeda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa laporan tahunan didasarkan pada hasil keuangan, beberapa langkah kinerja dasar dan narasi yang menjelaskan beberapa hasil operasional. Pemangku kepentingan dilayani dengan baik oleh laporan keuangan, namun menemukan kesulitan dalam menilai tren kinerja operasional dan kinerja operasional komparatif dari tiga organisasi yang berbeda. Beberapa indikator operasional yang dipublikasikan, terlepas dari masalah sebelumnya dalam layanan kebakaran yang menyebabkan pertanyaan parlemen. Kurangnya langkah-langkah kinerja yang tersedia untuk umum menghasilkan berkurangnya tingkat akuntabilitas kepada pemangku kepentingan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tindakan kinerja yang berguna berdampak negatif pada demonstrasi akuntabilitas kepada pemangku kepentingan eksternal. Manajemen layanan kebakaran dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pelaporan dan demonstrasi akuntabilitas mereka kepada pemegang saham eksternal seperti pemerintah dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan, tentunya harus didukung dengan literatur berdasarkan pemahaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik. (Sugiyono, 2017). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data Laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan ataupun literatur yang

mempunyai hubungan dalam penelitian yang sifatnya melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, contohnya yaitu catatan atau dokumentasi, laporan keuangan publikasi, laporan pemerintah, modul, dan lain sebagainya (J.Moleong, 2013).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, yang merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, buku, jurnal, maupun karya tulis lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat dilakukan dengan mencari rujukan atau literatur tentang berbagai teori yang memiliki kaitan atau relevansi dengan topik penelitian melalui buku-buku yang ada di perpustakaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018.

3.4 Definisi Operasional Konsep

Adapun definisi operasional konsep dalam penelitian ini dibuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Konsep

Konsep	Definisi	Indikator
Ekonomis	Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.	1. Ekonomis 2. Tidak Ekonomis 3. Ekonomis Berimbang
Efisiensi	Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (<i>method operation</i>). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.	1. Efisien 2. Tidak Efisien 3. Efisien Berimbang
Efektivitas	Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan <i>outcome</i> dan <i>output</i> . <i>Outcome</i> merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan <i>output</i> merupakan hasil yang dicapai dari suatu program	1. Efektif 2. Tidak Efektif 3. Efektif Berimbang

	aktivitas dan kebijakan. Tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.	
--	---	--

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan yaitu analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung kesehatan dasar tahun 2018 dari sisi Ekonomis berdasarkan konsep *Value For Money*. Yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Gambar 3.1

Rumus Rasio Ekonomis

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan}}{\text{Anggaran Penggunaan Dana Kegiatan}} \times 100\%$$

Sumber : Konsep Yang Disesuaikan Untuk Penelitian, 2020

Dengan ketentuan bahwa anggaran penggunaan dana kegiatan sebagai input dan realisasi penggunaan dana kegiatan sebagai nilai input. Rasio Ekonomis di atas akan dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kriteria Ekonomis

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
Jika < 100%	Tidak Ekonomis
Jika > 100%	Ekonomis
Jika = 100%	Ekonomis Berimbang

Sumber : (Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

2. Rasio Efisiensi

Gambar 3.2
Rumus Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Kegiatan}}{\text{Persentase penggunaan dana terhadap anggaran}} \times 100\%$$

Sumber: Konsep Yang Disesuaikan Untuk Penelitian, 2020

Dengan ketentuan bahwa Persentase Pencapaian Kegiatan sebagai output dan Persentase penggunaan dana terhadap anggaran sebagai input. Rasio Efisiensi di atas akan dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
Jika > 100%	Efisien
Jika < 100%	Tidak Efisien
Jika = 100%	Efisien Berimbang

Sumber : (Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).

3. Rasio Efektivitas

Gambar 3.3
Rumus Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pencapaian kegiatan}}{\text{Target pencapaian kegiatan}} \times 100\%$$

Sumber : Konsep Yang Disesuaikan Untuk Penelitian, 2020

Dengan ketentuan bahwa realisasi pencapaian kegiatan sebagai outcome dan target pencapaian kegiatan sebagai output. Rasio efektivitas di atas akan dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Jika > 100%	Efektif
Jika < 100%	Tidak Efektif
Jika = 100%	Efektif Berimbang

Sumber : (Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan RI. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 Dan Semester I 2019*. Batam: BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* (3rd ed.; S. Saat, ed.). Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- J.Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kemenkeu RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: DJPK
- Kloot, L. (2005). *Performance measurement and accountability in an Australian fire service*. <https://doi.org/10.1108/09513550910934538>
- Lexy Tambuwun, E., S Pangemanan, S., & Afandi, D. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado*. 2(4), 81–89. <https://doi.org/2203-1174>
- Liando, H. S., Paul, D., Saerang, E., & Elim, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*. 2(3), 1686–1694. <https://doi.org/2303-1174>
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). 2013: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Baru* (1st ed.; Mardiasmo, ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Purnomo, A., Putra, A., Gusti, N., & Wirawati, P. (2015). *Penilaian Kinerja Berbasis value for money atas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten tabanan. 1,*

252–268. <https://doi.org/2302-8556>

- Ratnasari, S. L. (2019). *Manajemen Kinerja Dalam Organisasi* (N. D. Anggraeni, ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- Roshayani, A., & Norzaihan, M. Z. (2017). *Performance Measurement And accountability of waqf institutions in malaysia*. 5. <https://doi.org/10.1051/shscon/20173600005>
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* (1st ed.). Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.; Mona, ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.; Rahmatika, ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulaksono, H. (2019). *Budaya Organisasi Dan Kinerja* (1st ed.; H. Rahmadani, ed.).

CURRICULUM VITAE



Nama : Okky Chandra

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 22 Agustus 1998

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : Okkychandra22@gmail.com

Pendidikan : - TK Negeri Pembina Tanjungpinang
- SDN 004 Bukit Bestari, Tanjungpinang
- SMPN 04 Kota Tanjungpinang
- SMKN 01 Kota Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang